

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG TAHUN 2008-2012**



Skripsi Oleh :

DANIEL KURNIAWAN THENDRA

01091403057

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat- syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Dikaitkan Dengan Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2008-2012”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir tingkat sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, CA selaku Ketua Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
4. Bapak Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ika Sasti Ferina SE, M.Si, Ak, CA selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
6. Bapak H. Aspahani, SE, MM, CA, Ak, selaku Ketua Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, perhatian, serta saran-saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, CA, selaku Anggota Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, perhatian, serta saran-saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen yang secara ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Staf tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya yang telah begitu baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini nantinya.
10. Kedua orang tuaku (Ali dan Lisa), adikku Ines Theresia, serta keluargaku yang telah memberikan semangat dalam hidup ini serta doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman-temanku Bryhan Arezda, M. Taufik Hidayat, Okik Gusti Saputra, Akmalsyah Putra, dan semuanya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya selama ini mulai dari awal kuliah sampai akhir kuliah.
12. Kakak-kakak tingkat dan adik tingkat. Terima kasih atas bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Seluruh pihak lain yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mudah-mudahan segala amal ibadah atas bantuannya akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik agar skripsi ini menjadi lebih baik sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penulis khususnya dan bagi semua pihak umumnya. Aamiin.

Penulis

Daniel Kurniawan Thendra

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa” (Al Ghazali)

“Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi menciptakan kasih.” (Lao Tse)

Hasil karya ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku
- Saudara-saudaraku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	vii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 . Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Masalah.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Keuangan Daerah.....	9
2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	9
2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
2.2. Pengertian APBD.....	11
2.2.1. Proses Penyusunan APBD.....	12
2.2.2. Proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	13
2.2.3. Klasifikasi APBD.....	16
2.3. Pendapatan Daerah.....	16
2.4. Belanja Daerah.....	19
2.4.1. Belanja Tidak Langsung.....	20

2.4.2.	Belanja Langsung.....	21
2.5.	Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	21
2.5.1.	Analisis Kinerja Pendapatan.....	22
2.5.2	Analisis Kinerja Belanja.....	27
2.7.	Penelitian Terdahulu.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian.....	32
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3.	Metode Analisis Data.....	32
	Analisis Kinerja Pendapatan.....	34
3.3.1.	Analisis Kinerja Belanja.....	34

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.	Analisis Kinerja Keuangan.....	36
4.1.1.	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palembang.....	37
4.1.1.1.	Analisis Varians (selisih) Pendapatan.....	37
4.1.1.2.	Analisis Varians (selisih) Belanja.....	39

4.1.1.3. Analisis Rasio Pertumbuhan Kota Palembang.....	40
4.1.1.4. Analisis Rasio Kemandirian (Derajat Desentralisasi) Keuangan Kota Palembang.....	43
4.1.1.5. Analisis Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palembang.....	49
4.1.1.6. Analisis Rasio Efisiensi Kota Palembang.....	53
4.1.1.7. Analisis Rasio Keserasian Pemerintah Kota Palembang.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Opini Laporan Keuangan Daerah Kota Palembang.....	5
Tabel 2.1. Pola Hubungan Rasio kemandirian.....	25
Tabel 2.2. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom.....	26
Tabel 2.3. Ukuran Tingkat fisiensi.....	27
Tabel 4.1. Perhitungan Selisih (Varians) Pendapatan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008-2012.....	38
Tabel 4.2. Perhitungan Selisih (Varians) Belanja Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008-2012.....	39
Tabel 4.3. Data Data Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan, Total Belanja Rutin dan Total Belanja Pembangunan Kota Palembang.....	41
Tabel 4.4. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008-2012.....	41
Tabel 4.5. Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008-2012.....	44
Tabel 4.6. Pola Hubungan Rasio Kemandirian.....	45
Tabel 4.7. Pola Hubungan Pemeintah Pusat dan Daerah Kota Palembang Serta Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	45
Tabel 4.8. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom.....	50
Tabel 4.9. Data Target Pendapatan Asli Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2007-2011.....	50
Tabel 4.10. Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008-2012.....	51
Tabel 4.11. Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008-2012.....	54

Tabel 4.12. Ukuran Tingkat Efisiensi.....	54
Tabel 4.13. Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008-2012.....	55
Tabel 4.14. Data Total Belanja, Realisasi Belanja Rutin, dan Realisasi Belanja Pembangunan Pemerintah Kota Palembang	57
Tabel 4.15 Perhitungan Rasio Keserasian Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008-2012.....	58

ABSTRAK

Analisis Rasio Keuangan Dikaitkan Dengan Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2008-2012

**Oleh:
Daniel Kurniawan Thendra**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2008-2012. Untuk menilai dan membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang tahun 2008-2012 dengan cara menggunakan beberapa alat Analisis Rasio Keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Pertumbuhan. Penggunaan data dalam menganalisis adalah laporan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2008-2012 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang masih belum stabil yang terkadang mengalami kenaikan dan penurunan, dan lebih besarnya belanja aparatur daripada belanja pelayanan publik.

Untuk itu perlu dilakukannya perbaikan agar kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang tersebut lebih baik. Perbaikan –perbaikan tersebut yaitu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target yang hendak dicapai dengan cara melakukan identifikasi pembayaran pajak yang baru/ potensial, mengembangkan potensi pariwisata daerah, perlu adanya peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang pajak daerah.

Kata kunci: Kinerja, Keuangan Daerah, Analisis Rasio

Pembimbing
Ketua,

Anggota,

H. Aspahani SE, MM, Ak, CA
NIP. 196607041992031004

Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196503111992032002

**Mengetahui,
Ketua Program**

Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak
NIP. 196503111992032002

ABSTRACT

Analysis of financial ratios attributed with the financial performance assessment of city government of Palembang in the fiscal year 2008-2012

By:

Daniel Kurniawan Thendra

The objective of the study is to measure the financial performance assessment of city government of Palembang in the fiscal year 2008-2012. In measuring and comparing the financial performance of the city, financial ratio analysis tools (independence ratio, effectiveness ratio, compatibility ratio, routine capability index ratio, and growth ratio) are used. The data use are realization reports of regional budgets. The results show that the financial performance of the city is unstable sometimes increasing and sometimes decreasing; regional apparatus expenditures are bigger than public expenditures in the fiscal year of 2008-2012. Improvements can be done by increasing local tax revenues and levies as targets to be achieved through new or potential taxpayer identification, developments of the potential of domestic tourism, improvements of the quality of human resources of government officials, and knowledge improvement and public awareness of local tax.

Key Words: Performance, Local Finance, Analysis Ratio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah memberikan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, APBD harus mampu memberikan informasi yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di

masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota telah memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap UU No.22 dan UU No.25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam ketentuan umum UU No.32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis, selebihnya sudah harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan serta mengembangkan keanekaragaman dan potensi daerah

(Darise, 2007).

Suatu ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi di jelaskan (Halim, 2001) yaitu:

1. kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan hasil daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi besar.

Dengan adanya otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik. Mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi bagi daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut akan memberatkan karena bagi daerah yang tidak mempunyai sumber dana yang melimpah akan kesulitan dalam membiayai belanja mereka (Adi, 2005). Sebelum era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiscal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah (Mardiasmo,

2002). Selain itu kemampuan keuangan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun system keuangannya, yaitu pemerintah pusat tidak mau serta merta kehilangan kendali atas pemerintah daerah (Dwirandra, 2007).

Kemampuan pemerintah daerah otonom dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan. Yang dimaksud anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2002). Anggaran daerah memegang peranan penting dalam era otonomi daerah, karena sebagai instrument kebijakan perencanaan strategic daerah dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2000).

Untuk memberikan keyakinan yang memadai, atas proses penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan proses akuntansi dan didukung oleh bukti yang cukup dan bebas dari salah saji, maka Laporan Keuangan perlu diaudit oleh akuntan independen dalam hal ini dilakukan oleh BPK-RI.

Kota Palembang sebagai salah satu kota di Sumatera Selatan yang juga berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun berdasarkan hasil audit BPK-RI, LKPD Kota Palembang masih belum memperoleh hasil yang optimal hal ini dibuktikan dengan terjadi peningkatan dan penurunan hasil opini audit. Hal ini membuktikan bahwa kondisi

keuangan pemerintah kota Palembang tidak berada dalam kinerja yang baik.

Opini BPK RI lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Opini Laporan Keuangan Kota Palembang

No	Tahun Anggaran	Opini
Audit		
1	2008	WDP
2	2009	WDP
3	2010	WTP
4	2011	WTP
5	2012	WTP

sumber: www.bpk.go.id

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian kemudian pada tahun 2008 dan 2009. Namun pada tahun 2010-2012 telah terjadi peningkatan opini audit yang signifikan dari opini yang Wajar Dengan Pengecualian terus meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Tetapi dengan meningkatnya opini audit, kondisi keuangan daerah tidak berada pada level yang sama.

Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah dilakukannya pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah dan penilaian kinerja keuangan daerah otonomi agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah otonom mampu melaksanakan otonomi khususnya di bidang keuangan. Kinerja pemerintahan daerah akan ditentukan oleh ketepatan kebijakan dalam pemberian pelayanan public yang ekonomis, efisien dan efektif, oleh karena itu para eksekutif dan legislatif harus memahami system penentuan APBD berdasarkan kinerja (Triyono, 2002).

Dalam melihat kinerja pemerintah daerah otonom dalam mengelola keuangan daerah dapat digunakan alat pengukuran kinerja berupa analisis rasio keuangan APBD terhadap kinerja Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan sekana periode waktu tertentu apakah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi cirri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2007). Artinya kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk

pembangunan negara. Oleh karena itu kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan suatu analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan, mengukur efisiensi belanja, serta mengukur sejauh mana kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya. Namun yang lebih penting adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai anggaran lebih banyak dipakai untuk belanja aparatur dibandingkan belanja publik.

Kinerja keuangan pemerintah menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya -untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Rasio keuangan dikaitkan dengan Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palembang**

Tahun 2008-2012”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah adalah Bagaimana kinerja keuangan Kota Palembang jika di ukur dengan rasio keuangan daerah selama periode 2008-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kota Palembang selama periode 2008-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Keuangan Kota Palembang diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta
- Rosalina, Eka. 2008. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi kasus di Propinsi Sumatera Barat (Thesis S2)*. Universitas Gajah Mada.
- Nordiawan, Dedi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2007. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:UPP STIMYKPN.
- Yuwono, S., I.T. Agus, dan Haryadi. 2005. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Ronald, Andreas. Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo.(Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi)*. Universitas Janabadra.
- Darwanto, dan Yustikasari, Yulia.2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.(Simposium Nasional Akuntansi X)*. Universitas Gajah Mada.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*
- Susantih, Heny. Saftiana Yulia.2009. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se- Sumatera Bagian Selatan.(Simposium Nasional Akuntansi XII)*. Universitas Sriwijaya.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 *tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun*

Anggaran 2007

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
***Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah***